



SEMINAR NASIONAL I

▶ **PERAN ILMU-ILMU SOSIAL
DALAM PEMBANGUNAN
INDONESIA BARU**

Padang, 15-17 Oktober 2014



**UNIVERSITAS
ANDALAS**



Prosiding Seminar Nasional Ke-1

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Peran Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan Indonesia Baru

x, 854 halaman, 28 cm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Copyright @2014

ISBN: 978-602-71540-0-1

Penyunting:

Dr. Asrinaldi, M.Si

Drs. Syaiful, M.Si

Muhammad Hidayat, S. Sos, MA

Rendhy Atriadi, S. Kom

Dr. Indraddin, M.Si

Yayuk Lestari Sos. MA

Diterbitkan oleh:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Alamat:

Kampus Limau Manis, Padang 25163

Telep/Faks. 0751-71266

Website: www.fisip.unand.ac.id



KATA SAMBUTAN DEKAN FISIP UNAND

Pertama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar Nasional dan selamat atas terbentuknya kepengurusan HIPIIS Provinsi Sumatera Barat Priode 2014-2019 di FISIP UNAND Padang.

FISIP UNAND mendorong acara ilmuwan sosial untuk memikirkan dan mencari solusi yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Selain itu, dengan berpartisipasi pada perkembangan ilmu-ilmu sosial peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi kontri nusi terhadap persoalan Indonesia ke depan. Indikator perkembangan tersebut salah satunya adalah dilihat dari kemunculan paradigma, teori, konsep yang digunakan oleh ilmu sosial yang mampu menjelaskan fenomena yang dihadapi masyarakat, sehingga mampu dihimpun menjadi gagasan akademis dan praktisi yang berlatar belakang ilmu-ilmu sosial untuk didiskusikan pada forum seminar nasional FISIP 2014.

Harapan kami dengan diangkatkannya acara Seminar Nasional I FISIP tahun 2014 dengan tema “Peran Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Indonesia Baru” dapat terbentuknya “*kinship relations*” bagi seluruh peserta di tingkat nasional. Terlaksananya acara Seminar Nasional ini diharapkan dapat berlanjut menjadi wadah terbentuknya jejaring kerja antara akademisi di Indonesia, khususnya dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Akhirnya, pimpinan Fakultas mengharapkan kritik dan saran peserta Seminar Nasional tahun 2014, agar pelaksanaan acara Seminar Nasional di tahun depan dapat dilakukan lebih sempurna. Kepada tim panitia seminar yang telah bekerja keras dan semua pihak yang telah membantu kesuksesan acara ini disampaikan terimakasih.

Padang, Oktober 2014

Prof. Dr. rer. soz. Nursyirwan Effendi
NIP.196406241990011002



KATA PENGANTAR KETUA PANITIA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga penyusunan buku prosiding Seminar Nasional Ke-1 dengan tema “Peran Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan Indonesia Baru” dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya

Buku prosiding ini merupakan kumpulan artikel peserta seminar nasional yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah dipresentasikan di kampus Universitas Andalas, Padang tanggal 15-16 Oktober 2014. Kami menyadari bahwa penyusunan buku prosiding ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan tanpa peran dan partisipasi berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami dari kepanitiaan ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, Rektor Universitas Andalas yang telah memfasilitasi kegiatan seminar nasional ini sehingga dapat dilaksanakan.
2. Bapak/Ibu panitia seminar nasional yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan seminar nasional ini sehingga terselenggara dengan baik.
3. Bapak/Ibu pemakalah yang telah menyumbangkan artikelnya sehingga penyusunan buku prosiding ini dapat terwujud.

Kami berharap buku prosiding ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial, terutama sumbangannya untuk pembangunan Indonesia Baru yang lebih baik ke depan.

Kami juga menyadari terbatasnya kemampuan dalam melaksanakan seminar nasional ini. Oleh karenanya, kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan seminar nasional ini. Semoga di tahun hadapan, penyelenggaraan ini akan menjadi lebih baik.

Padang, 15 Oktober 2014

Ketua,

Dr. Indraddin, M.Si

NIP. 196711301999031001

Pengantar Penyunting

Perkembangan ilmu-ilmu sosial yang sangat pesat harus disikapi secara positif karena dapat memberi sumbangan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi dengan kondisi Bangsa Indonesia saat ini yang baru saja melakukan rotasi kepemimpinan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo. Sepuluh tahun periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berhasil dilaksanakan dengan baik dengan membawa beberapa perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari perkembangan demokrasi yang sudah mengarah kepada arah yang lebih baik. Misalnya, ini dapat dibuktikan dengan terselenggaranya Pemilu tahun 2009 dan tahun 2014 secara damai dan berkeadaban. Memang tidak dinafikan ada beberapa persoalan kecil dalam proses berdemokrasi yang berlangsung tersebut. Namun dengan semangat kebersamaan masalah itu dapat diatasi karena elitnya sudah mulai berpikir bagaimana mendahulukan kepentingan bangsa yang lebih besar. Sementara dari aspek lain, pemerintah juga telah berupaya memberi perhatian pada keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan dengan menempatkan dimensi gender sebagai salah satu dasar pembuatan kebijakannya. Memang kalau dilihat dari angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan keterwakilan perempuan di institusi pemerintahan masih jauh dari harapan publik, namun pemerintah sebenarnya sudah memberi landasan yang kokoh untuk pengembangan kebijakannya yang pro gender.

Dari segi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan pemerintahan juga menjadi catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan afirmatif pemerintah yang menempatkan perempuan sebagai figur yang harus diberi perhatian dan keistimewaan dalam proses politik sudah dilaksanakan. Namun faktanya, masyarakat masih menganggap perempuan “belum siap” untuk menjadi anuta masyarakat sehingga dukungan terhadap mereka dalam proses politik dan pemerintahan tidak maksimal. Walaupun sebenarnya kebijakan afirmatif ini menjadi paradoks dengan hakikat demokrasi prosedural yang mensyaratkan adanya kontestasi dalam proses politik (Dahl, 1971).

Bangsa Indonesia juga sedang menghadapi masalah sosial dan kemanusiaan yang masih harus ditangani secara serius. Angka kemiskinan yang masih tinggi serta pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi bawah seperti nelayan, kaum buruh tani, pedagang kaki lima, sopir, tukang ojek dan lain sebagainya masih menjadi kendala bagi kemajuan bangsa ini. Kemiskinan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia karena masih kuatnya budaya patron-klien dalam masyarakat sehingga masyarakat sulit lepas dari jeratan kemiskinan. Tidak jarang patron yang berada pada strata yang lebih tinggi kedudukannya dari klien, justru memberikan “perlindungan” yang sebenarnya merugikan klien. Patron, dalam empirisnya, cenderung mengeksploitasi klien untuk kepentingan tertentu (Scott, 1972). Tentu ini menjadi catatan sendiri bagi pemerintahan baru yang baru saja terbentuknya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan Bangsa Indonesia terlalu lambat untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang menjadi potensi yang dapat dikembangkan selama ke depan. Fenomena ini dipahami oleh Pemerintahan Joko Widodo dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lautnya yang luas, tentu cita-cita untuk menjadi poros maritim dunia bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

Dari bidang sosial dan budaya, Indonesia juga memiliki masalah terkait dengan jati diri bangsa yang sudah mulai tergerus dengan masuknya nilai-nilai global. Ideologi Pancasila tidak lagi menjadi anutan generasi muda karena elitnya gagal memberikan teladandalam bersikap dan bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan di khawatirkan, kedepan, krisis ideologi menjadi tantangan serius bagi Pemerintahan “Jokowi” ini. Kecenderungan menguatnya fenomena transnasional dan

multikulturalisme menjadi masalah besar dalam masyarakat di tengah tuntutan masyarakat untuk mengurangi peran negara dalam aktivitas masyarakat. Ini adalah implikasi kuatnya gagasan tentang pluralisme dalam masyarakat yang sadar atau tidak sebenarnya mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara yang harus dipertahankan.

Selama ini, pemerintah daerah juga belum maksimal kalau tidak mau dikatakan gagal dalam meningkatkan kapabilitasnya memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Umumnya pemerintah daerah belum bisa mengembangkan *e-government* dengan basis kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Jika dilihat perkembangan *e-government* yang dilaksanakan di daerah, maka yang baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah hanyalah pada tahapan awal saja, yaitu *web presence* ketimbang melaksanakan *e-democracy* sebagai tahapan tertinggi. Tingkatan *web presence* adalah tingkatan terendah dari sebuah tahapan perkembangan *e-government* yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan menyediakan informasi di situs pemerintah *per se* untuk diinformasikan ke publik (Siau & Long, 2005).

Banyak isu-isu yang berkembang dalam masyarakat inilah yang mendorong ilmuwan sosial untuk membahas dan menganalisisnya sebagai bentuk tanggung jawab moral mereka membangun Indonesia yang lebih baik. Ilmuwan sosial yang peduli dengan keadaan ini mencoba mencari penyelesaian masalah tersebut dengan mengendepankan dialektika gagasan dan fakta yang ada. Ini sesungguhnya bagian kepedulian mereka terhadap pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan "Jokowi-JK". Paling tidak, apa yang sudah diperbincangkan dan dibahas dalam seminar nasional menjadi awal yang baik untuk membantu Pemerintahan Joko Widodo mewujudkan tujuan pembangunan di era pemerintahan baru ini.

Daftar Pustaka

- Dahl, R. 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press
- Siau, K. & Long, Y. 2005. Synthesizing e-government stage model—a meta-synthesis based meta-ethnography approach. *Industrial Management & Data System*, 105(4):443-458.
- Scott, J. C., 1972. Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia, *American Political Science Review*, 66(71): 91-113

Daftar Isi

Kata Pengantar Dekan.....	ii
Kata Pengantar Ketua Panitia	iii
Pengantar Penyunting	iv
Makalah	
Bidang Politik	10
Desain struktur organisasi Pemerintahan Daerah yang efektif sebagai upaya menghindari mal administrasi dalam tubuh birokrasi Oleh Desna Aromatika (Fisip Universitas Andalas).....	11-16
PNS Berada Di Persimpangan Menegakkan Aturan Atau Aturan Atas Nama Atasan Oleh Afrinaldy Rustam (UIN Riau).....	17-28
Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Terhadap Pelayanan Publik Oleh Suci Yuzana Andriani (Fisip Universitas Andalas).....	29-38
A'pa Alliri: Kepemimpinan Lokal Di Matajang Oleh Syamsul Bahri, Harifuddin Halim, Muhammad Masdar dan Rosmawati (Univ. Tadulako, STKIP Cokroaminoto, Univ 45 Makasar	39-48
Konstelasi Politik Lokal Pasca Pemilihan Presiden 2014 Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Sumatera Barat Oleh Asrinaldi (Fisip Universitas Andalas).....	49-59
Gerakan Sosial Sayap Politik PKS di Universitas Andalas Oleh Arifki (Fisip Universitas Andalas)	60-68
Broker dan Distribusi Politik dalam Pemilu Legislatif 2014 Oleh Irawati (Fisip Universitas Andalas)	69-77
Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Dasar Rakyat Oleh Akmal (FIS Universitas Negeri Padang).....	78-101
Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Indonesia di Parlemen Oleh Audra Jovani (Universitas Kristen Indonesia)	102-111
Kiprah Perempuan Dalam Lembaga Legislatif (Sebuah Studi Tentang Partisipasi Perempuan Anggota DPRD Riau Periode 2009-2014) Oleh Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si (UIN Sultan Syarif Kasim Riau).....	112-130

Keterpurukan Perempuan Dalam Kasus Korupsi Hias Media Massa Oleh Riri Yanti Zahrul (Fisip Universitas Andalas).....	131-142
Motivasi Politik Kepala Desa Perempuan Di Provinsi Jawa Timur Oleh Andri Rusta, Jendrius, Putri Gemala Sari (Fisip Universitas Andalas)	143-152
Representasi Kepemimpinan Perempuan Minang Di Pemerintahan Lokal Oleh Fatmariza (FIS Universitas Negeri Padang)	153-165
Menuju Pemilu Yang Demokratis Oleh Suryanef dan Al Rafni (FIS Universitas Negeri Padang)	166-174
Identifikasi Partisipasi Politik Ulama Tarekat Syathariyah Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 Oleh Sadri Chaniago, M Soc. Sc (Fisip Universitas Andalas)	175-187
Persepsi Masyarakat Padang pada Debat Politik Capres Dalam Komunikasi Politik Pilpres 2014 di Televisi Nasional Oleh Elva Ronaning Roem (Fisip Universitas Andalas).....	188-215
Pola Kampanye Melalui Media Dan Tingkat Partisipasi Politik Oleh Kusuma Dewi (Fisip Universitas Andalas).....	216-229
Analisis Media, Partai Politik, dan DPR pada Pemilu 2014 Oleh Riswandi (Universitas Mercu Buana)	230-295
Bidang Pengentasan Kemiskinan	296
Menemu-Kenali Perangkap Kemiskinan Nelayan Oleh Ansar Arifin (Universitas Hasanuddin), Haslinda B Anriani dan Musta'inah (Univ. Tadulako), Rasyidah Zainuddin Univ 45 Makasar)	297-306
Efektifitas SKIM Program Pengentasan Kemiskinan di Kampung Jua, Kota Padang Oleh Rinaldi Ekaputra, Machdaliza, Indraddin dan Ardi Abas (Fisip Universitas Andalas)	306-321
Peran Website Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia oleh Yovi Fransiska (Fisip Universitas Andalas).....	322-331
Dilema Pembangunan Karakter Desa dan Kemiskinan (Studi Pembangunan Karakter Pedesaan Muslim yang Memperoleh Bantuan Dana Pengentasan kemiskinan di Kanagarian pariangan Batusangkar Oleh Muhammad Hidayat, Hidayati .N (STAI Al-Hikmah Pariangan Batusangkar).....	332-359

Transparansi Informasi	360
Transparansi Informasi Melalui Website Pemerintah Oleh Neneng Nurlela (Fisip Universitas Andalas)	361-417
Efektivitas Komunikasi Humas Melalui Media Sosial Oleh Multia Qairanni (Fisip Universitas Andalas).....	418-431
Transparansi Informasi Internal Melalui Website e-Government (Studi Kasus di Pemko Padang Panjang Oleh Maryulis (Fisip Universitas Andalas)	432-445
Efektivitas Facebook Sebagai Media Komunikasi Dua Arah Dalam Membentuk Citra Pemerintahan (Studi Pada Media Sosial facebook Humas & Protokol Kota Padang) Oleh Yeni Rizal (Fisip Universitas Andalas).....	446-456
Mewujudkan Transparansi Informasi Melalui Pengelolaan Komunikasi Humas Pemerintah Oleh Neni Yuniarti (Fisip Universitas Andalas)	457-466
Pemanfaatan Media Sosial Facebook Oleh Humas Pemko Padang Dalam Diseminasi Informasi Program Pemerintah Oleh Eka Perwita Sari (Fisip Universitas Andalas)	467-489
Aspek Penting Humas Di Era Keterbukaan Informasi Publik Oleh Lili Susanti (Fisip Universitas Andalas)	490-496
Multikultural	497
Kerangka Agung Dan Konsep Multikultural Oleh Rois Leonard Arios (Fisip Universitas Andalas)	498-507
Dari Tradisi Ke Festival Siti Nurbaya (Studi Kasus Tradisi Malamang di Kota Padang) Oleh Zulfa dan Kaksim (STKIP PGRI Sumatera Barat)	508-523
Kepuasan Cinta Warna-Warni Kontestasi Pluralisme Hukum Oleh M Rawa El Amady (P A D I Institute)	524-531
Pemertanian Multikultural Dalam Sosio Budaya Minangkabau (Ditinjau dari Perspektif Multikultural Kritis) Oleh Isnarmi Moeis (FIS Universitas Negeri Padang).....	532-540
Kewarganegaraan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Oleh Sri Narti (Fisip Universitas Andalas)	541-549
Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan gaya hidup masyarakat pedesaan di Sumatera Barat Oleh Nasyirwan Effendi (Fisip Universitas Andalas).....	550-568

Transnasionalisme	569
Arah Politik Luar Negeri Indonesia 2014-2019: Menuju Poros Maritim Dunia Oleh Anita Afriani Sinulingga (Fisip Universitas Andalas)	570-578
Masyarakat Sipil Transnasional Dan Demokratisasi Di Indonesia Oleh Virtuous Setyaka dan Febryna Mulya Forum INDERA	579-590
Penguatan Ideologi Pancasila sebagai Modal Membangun Indonesia Baru Oleh Hendar Putranto (Universitas Multimedia)	591-609
Strategi Marketing Public Relations PT Garuda Indonesia pada Program GFF (Garuda Frequent Flyer) Oleh Shitta Afrinadia dan Refika Mastanora (Fisip Universitas Andalas).....	610-617
Pemerintahan Lokal	618
Model Pemberdayaan Institusi Lokal dalam Pemanfaatan Remitan Migran Internasional Asal Sumatera Barat Oleh Indraddin (Fisip Universitas Andalas).....	619-636
Tata Kelola Penanggulangan Bencana Alam (Suatu Deskripsi Inter-Relasidan Kesiapan Para Pihak dalam rangka Rehabilitasi-Rekonstruksi Rumah Warga Terdampak Pascagempa di Kabupaten Tanah Datar) Oleh Edi Indrizal (Fisip Universitas Andalas)	637-657
Revitalisasi Peran Tradisional Penduduk Lansia Dalam Keluarga Dan Komunitas Di Daerah Rawan Bencana Oleh Pawennari Hijjang (Universitas Hasanuddin) dan Ummanah (STIA ALAZKA).....	658-668
Efektivitas Komunikasi Humas Melalui Media Sosial Oleh Multia Qairanni (Fisip Universitas Andalas).....	669-682
Analisa Game Theory Politik Lokal Dana Perimbangan Propinsi Jawa Barat Oleh Tamrin (Fisip Universitas Andalas).....	683-694
Civil Sociality	695
Warung Tenda Payung Ceper (Analisis Sosiologi Perilaku Menyimpang di Pantai Padang) Oleh Wahyu Pramono dan Machdaliza (Fisip Universitas Andalas)	696-721
Kontestasi Ruang Ekonomi Kota : Studi Konflik Perebutan Ruang Ekonomi di Pasar Raya Padang Oleh Firdaus (STKIP PGRI Sumatera Barat).....	722-729
Ketidaksinambungan Program Millenium Development Goals di Pemerintahan kota Padang Oleh Amelia Arnis dan Vioni Fauzia (Fisip Universitas Andalas).....	730-737

Media Yang Efektif Dalam Mensosialisasikan PNPM Mandiri Kecamatan Kota Argamakmur Oleh Vethy Octaviani (Fisip Universitas Andalas)	738-746
Dinamika Kelompok, Kepemimpinan Dan Masalah Kelompok Menuju Kemandirian Petani: Kasus kelompok tani di sentra-sentra kakao di Kabupaten Padang Pariaman Oleh Asmawi, Rahmi Surya Dewi, Hery Bachrizal Tanjung (Fisip Universitas Andalas) ...	747-761
Pengetahuan Dan Kesadaran Perempuan Tentang Resiko Keguguran Dan Aborsi Yang Tidak Aman Oleh Sri Meiyenti dan Yunarti (Fisip Universitas Andalas).....	762-777
Penyesuaian Kembali (Readjustment) Peran Dan Hubungan Sosial Pasangan Yang Bercerai Oleh Fachrina dan Nini Anggraini (Fisip Universitas Andalas)	778-788
Badan Pemberdayaan Keluarga Indonesia (BPKI) (Gagasan untuk pemerintah Jokowi-JK tentang masyarakat/sosial) Oleh Wahyu Gunawan (Fisip Unpad)	789-798
Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berbasis Nilai-Nilai Sosial Lokal Pada Masyarakat Minangkabau Oleh Dwiyanti Hanandini dan Nini Anggraini (Fisip Universitas Andalas)	799-824
Stagnas Keberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar Oleh Syaifullah Cangara (Fisip Universitas Hasanudin).....	825-845
Makanan Sebagai Pembeda Sosial: Suatu Kajian Perubahan Budaya Makan Oleh Yevita Nurti (Fisip Universitas Andalas).....	846-854

MAKALAH
Bidang Ilmu Politik

BADAN PEMBERDAYAAN KELUARGA INDONESIA (BPKI)

(Gagasan untuk pemerintah Jokowi-JK tentang masyarakat/sosial)

Oleh :

WAHYU GUNAWAN¹⁵⁸

Abstrak

Ketidak tersediaan lapangan kerja di dalam negeri menjadi pemicu masalah masyarakat Indonesia, selain upah yang tidak layak dan beban hidup yang tidak bisa diselesaikan karena pendapatan rendah, selain masalah non ekonomis lainnya seperti kebijakan ekonomi yang tidak pro rakyat, perpecahan keluarga, perceraian, dsb

Analisa : Pemerintah yang akan datang perlu fokus pada masyarakat yang berpendapatan rendah baik di kota maupun di desa. Kesimpulan : pemerintah yang akan datang harus memprioritaskan pembangunan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di kota maupun di desa. Saran : perlu kajian dan pengembangan serta program yang intensif dalam hal pembangunan masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di kota maupun di desa untuk : memberdayakan keluarga berpenghasilan rendah dan masalah ekonomi masyarakat lainnya seperti aspek beban hidup, pendapatan, daya beli masyarakat dan pengendalian harga kebutuhan masyarakat; peningkatan ketahanan keluarga khususnya yang terkait dengan ancaman budaya luar dan upaya menghilangkan budaya internal yang negatif serta menyehatkan jiwa/mental masyarakat dan perlindungan pekeija dan keluarga migran.Rekomendasi : sudah saatnya pemerintah yang akan datang mengeluarkan lembaga berbentuk badan dengan kebijakan dan program khusus untuk menangani keluarga yang termasuk berpenghasilan rendah dengan meluncurkan Badan Pemberdayaan Keluarga Indonesia (BPKI) yang mengintegrasikan semua tugas pokok dan fungsi terkait disemua lembaga dalam satu badan untuk meningkatkan ketahanan keluarga khususnya di bidang sosial (budaya, kesehatan dan hukum) dan ekonomi yang bertanggung jawab penuh kepada presiden dengan tugas penuh membentuk pranata-pranata ketahanan keluarga di Masyarakat Indonesia.

Kata kunci : Pemberdayaan keluarga, Kesehatan jiwa/mental masyarakat, Perlindungan pekerja dan keluarga migran, pranata ketahanan keluarga, Badan Pemberdayaan Keluarga Indonesia (BPKI)

¹⁵⁸ Mahasiswa S3 Program Studi Sosiologi Pasca Sarjana FISIP-Unpad, Ketua Program studi Sosiologi FISIP-Unpad.

Abstract

Unavailability of jobs in the country triggered the issue of Indonesian society, in addition to unfair wages and living expenses that can't be resolved because of low income, in addition to the non-economic issues such as economy policy are not pro-people, family breakdown, divorce, etc.

Analysis: Government impending need to focus on low-income communities in both urban and rural. Conclusion: next government must give priority to the development of low income earners both in cities and in villages. Suggestions: needs assessment and program development as well as intensive in terms of the development of low income earners both in cities and villages for: empowering low-income families and other community issues such as the economic aspects of the burden of life, income, purchasing power and price control needs of the community; increase the resilience of families, particularly in relation to the threat of foreign cultures and eliminating the negative internal culture and nourish the soul/mental society and the protection of migrant workers and their families. Recommendation: it is time for the government to come to the entity issuing agency policies and programs to deal with low-income families including the launch Indonesian Family Empowerment Board (BPKE) which integrates all relevant duties and functions in all institutions in the body to increase the resilience of the family especially in the social (cultural, health and law) and economy are fully responsible to the president with the task of ensuring full family security institutions in Indonesian Society.

Keywords: Empowerment family, mental health / mental society, protection of migrant workers and their families, family resilience institutions, Indonesian Family Empowerment Board (BPKE).